

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada dua pendapat dikalangan pejabat negara Indonesia tentang Lembaga Swadaya Masyarakat/*Organization Non Government* (LSM/Ornop) dan perannya dalam proses pembangunan di Indonesia. Pendapat pertama menyatakan bahwa LSM/Ornop di Indonesia adalah organisasi yang senang membuat ribut-ribut dengan cara mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya menuntut pemerintah agar lebih demokratis, lebih mengakui hak asasi manusia, dan lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pembangunan. Pendapat jenis ini masih merupakan yang terbesar dari para pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendapat kedua melihat LSM/Ornop adalah organisasi yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang direncanakan. Tetapi, mengapa sikap dan persepsi sebagian besar pejabat pemerintah terhadap LSM/Ornop di Indonesia masih menganggap sebagai suatu kekuatan oposan terhadap kebijaksanaan pembangunan pemerintah dan bukan sebagai mitra.

Semenjak runtuhnya dominasi negara yang merupakan dampak dari gerakan reformasi, suatu pengalaman dinegara-negara yang diperintah dalam

naungan rezim otoriterian, nampaknya telah mulai tumbuh harapan baru masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik. Semaraknya keterlibatan warga dalam berbagai arena, setidak-tidaknya menjadi petunjuk awal, bahwa partisipasi masyarakat nampaknya jauh melebihi keadaan masa lalu.

Dibawah kekuasaan rezim Orde Baru, negara selalu dianggap sebagai institusi "*serba tahu*" tentang segala hal kehendak warganya. Kebijakan-kebijakan politik, sosial dan ekonomi (yang menyangkut kepentingan publik) selalu ditetapkan oleh rezim yang berkuasa yang *notabene*, selalu menisbikan kepentingan rakyat. Walaupun institusi-institusi politik formal tersedia, tetapi dalam praktiknya selalu diterobos. Lembaga politik representasi hanyalah sebagai "*etalase*", tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pemekaran kekuasaan negara tersebut berdampak pada terbonsainya dan kian tidak berdayanya masyarakat.

Keberadaan lembaga-lembaga politik yang secara normatif berfungsi sebagai saluran strategis aliran aspirasi tidak bermanfaat langsung bagi perubahan nasib rakyat. Lembaga perwakilan diberbagai tingkatan "*ompong*", oleh karena bekerjanya kooptasi pemerintah. Proses ini lah yang disebut, negara sedang menjalankan politik kooperatif. Adalah sistem politik yang menghadirkan organisasi-organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan, tetapi ternyata fungsinya hanyalah sebagai agen politik dari negara. Karena merupakan "*kepanjangan tangan*" dari negara itulah, lembaga melakukan kontrol terhadap warganya. Wajar saja ketika yang kemudian timbul adalah kepatuhan massa, ketaatan dan loyalitas terhadap kekuasaan negara. Masyarakat mengikuti perintah bukan karena

kesadaran, tetapi karena ancaman dan represi secara sistematis dan hegemonik. Akibatnya terjadi penumpukan kemampuan inisiasi dan daya kritis warga dalam memahami realitas sosial di sekelilingnya. Itulah distorsi yang terjadi dalam lembaga perwakilan.

Paradigma developmentalis yang dianut rezim Orde Baru, disatu sisi mampu “memperbesar angka” pertumbuhan ekonomi nasional (akibat konglomerasi ekonomi yang kolusif), namun disisi lain rezim negara itu mendepolitisasi dan merepresi peran rakyat. Perilaku negara semakin terlegitimasi oleh stabilitas keamanan dan berkurangnya cerita kemiskinan rakyatnya. Relasi yang terjadi bersifat paradoksal, negara sangat kuat karena kuasa, sementara rakyat lemah karena termarginal.¹

Marginalisasi rakyat terjadi ketika kebijakan ekonomi berpihak pada kaum industrialis yang berjasa memenuhi kebutuhan pribadi penguasa. Sehingga meski industri bertebaran dibelahan negeri ini, rakyat menjadi buruhnya dengan kesejahteraan ekonomi yang sangat jauh dibawah standar.

Melihat kontradiksi ini, munculah kesadaran kaum menengah/intelektual idealis kritis untuk mengambil peran. Mereka mengadopsi dan mereplikasi gerakan *Non Government Organization (NGO)* yang muncul di negara-negara benua Eropa dan Amerika. Setting sejarah kelahiran NGO Indonesia (kalangan pemerintah RI senang dengan menyebutnya LSM dan kemudian dikenal dengan Organisasi Non Pemerintah/ORNOP) di awal 1970-an tersebut secara mudah

¹ John Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 1995, hal 50.

dipahami sebagai bentuk “perlawanan” elemen intelektual kritis/idealis terhadap kelalaian negara memeratakan kesejahteraan sosial ekonomi rakyatnya (kaum marjinal). Awal gerakan mereka, lebih memfokuskan diri pada upaya pelayanan sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dipakai dengan asumsi bahwa mereka akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melengkapi/mengisi ruang kebijakan ekonomi yang tidak dipakai oleh Negara. Asumsi tersebut ternyata salah, karena negara semakin represif dan otoriter sehingga marginalisasi kelompok masyarakat semakin menumpuk.

Pertengahan 1980-an sampai di penghujung usia kekuasaan rezim orde baru (1998), pola pendekatan LSM/ORNOP, yang dipakai adalah peran-peran advokasi. Pendekatan ini dipilih dengan asumsi bahwa persoalan sosial ekonomi bertautan dengan kekuasaan politik. Sementara itu, peran advokasi dipilih karena cukup strategis sebagai media penyebaran paham-paham tandingan dominasi serta pandangan kritis untuk pengajuan perubahan atas kebijakan publik yang sekiranya tidak aspiratif.

Respon Negara terhadap peran LSM/Ornop rupanya sangat negatif, negara secara sistematis formal berusaha keras menyingkirkan eksistensi Ornop melalui Undang-undang Ke-ormas-an dan Undang-undang pendukung lainnya guna “*membungkam kegiatan*” para aktivis LSM. Mendapatkan respon yang menyakitkan tersebut, kalangan LSM/Ornop dan aktivisnya justru berkonsolidasi serta mengeraskan sikap kritis dan radikalisme dalam berhadapan dengan negara.

Negara bagi kalangan LSM/Ornop dan aktivisnya dijadikan "musuh bersama" (*common enemy*). Karena itu, agar proses demokrasi tercapai maka NGO harus mengekang negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya lagi. Ketika proses konsolidasi dan diskursus *standing position* LSM/Ornop tengah berlangsung intensif, tiba-tiba kekuasaan Orde Baru tumbang oleh kekuatan rakyat sipil dan peta politik Indonesia berubah total. Negara RI pasca 1998 ini pun berganti muka, menjadi negara berpemerintahan sipil yang mau menyediakan ruang kebebasan bersuara, berpartisipasi dan berpolitik.

Reformasi yang digulirkan untuk merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan memperkuat *civil society*. dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam dinamika politik. Hal ini diawali dengan mulai tumbuhnya minat dan aspirasi masyarakat untuk berperan aktif dalam lembaga-lembaga politik lokal dan forum-forum kewargaan. Baik itu berbasis asosiasi kepartaian, utusan-utusan dusun, kelompok-kelompok kepentingan berlandaskan pekerjaan, kaum profesional, atau golongan kepemudaan, perwakilan perempuan aserta kelompok keagamaan.

Kehadiran parlemen warga dan komunitas, telah menjadi harapan baru bahkan impian yang ditunggu-tunggu agar menjadi saluran efektif aspirasi warga dalam pembangunan. Lembaga ini diharapkan dapat berperan dalam fungsi legislasi, kontrol formal, dan pemberdayaan masyarakat. Seperti merumuskan program kerja, penetapan anggaran pembangunan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Hal ini kemudian memicu banyak bermunculannya LSM/Ornop

yang dapat dengan bebas dalam mewakili aspirasi masyarakat. Banyaknya LSM/Ornop yang lahir membuat masyarakat dapat dengan dengan mudah menyalurkan aspirasi sesuai dengan keinginannya. Kekuatan rakyat sipil yang telah mendapat ruang berpartisipasi melalui partai politik dan kelembagaan sosial.

Di tengah membengkaknya partisipasi masyarakat msyarakat tersebut lahirlah sebuah harapan yang besar. Tetapi sekaligus juga sebuah kekhawatiran. Bangkitnya kesadaran masyarakat dianggap dapat mempercepat terwujudnya cita-cita perubahan, menuju kehidupan sosial, kondisi ekonomi dan tata politik yang lebih baik. Terjaminnya keadilan dan capaian kesejahteraan secara merata, melalui cara-cara demokratis. Dengan harapan bahwa dikemudian hari dapat menuntaskan permasalahan-permasalahan, seperti pemberantasan masalah korupsi yang terjadi di wilayah birokrasi struktur kekuasaan, praktek-praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia, kelompok-kelompok lama yang berusaha mempertahankan *status quo*. Dan yang ada pada posisi ekonomi dimana ada problem kemiskinan yang semakin membengkak dan serangkaian konflik-konflik kekerasan yang semakin merajalela. namun LSM/Ornop yang menjadi perwakilan dari aspirasi masyarakat masih dapat menjaga optimisme mereka dan selalu percaya bahwa semua rintangan tersebut dapat diatasi semuanya walaupun dengan kondisi berdarah-darah sekalipun.

Lembaga swadaya masyarakat telah menjadi aktor di panggung pembangunan lebih lama daripada Bank Dunia, PBB ataupun lembaga-lembaga resmi lainnya. NGO/Ornop memiliki beraneka ragam, kredibilitas dan kreatifitas yang lebih daripada waktu sebelum-sebelumnya. Di negara-negara berkembang

keberadaan mereka terkait erat dengan penduduk lokal dan melaksanakan kegiatan yang sekiranya sulit dilaksanakan oleh pemerintah. LSM/Ornop merupakan salah satu pelopor pendekatan pembangunan yang baru dan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung merugikan rakyat dan lingkungan.

Keterlibatan LSM/Ornop didalam pembangunan di Indonesia telah merubah citra pembangunan. Kehadiran LSM/Ornop pertama kali memberikan kepada masyarakat sebuah pilihan model pembangunan diluar model pembangunan yang di tetapkan oleh pemerintah. Bagi rakyat miskin yang berada baik di perkotaan maupun dipedesaan, kehadiran LSM/Ornop dapat membuat mereka merasakan pembangunan dapat menyentuh mereka dengan program-program yang khusus dirancang LSM/Ornop untuk mereka. Sementara itu keberadaan LSM/Ornop untuk pertama kali dalam proses pembangunan seperti, perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan.²

Dari segi-segi itu dapat dikatakan bahwa keberadaan LSM/Ornop di dalam sebuah negara telah mendorong terjadinya demokratisasi di dalam pembangunan. Namun demikian efektifitas LSM/Ornop sebagai wahana demokratisasi pembangunan sangat tergantung pada sikap pemerintah dalam pembangunan suatu negara. Hal ini menjadi sangat penting karena sekarang ini banyak LSM/Ornop yang tidak hanya melaksanakan tugas dalam bidang pembangunan saja tetapi juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi politik

² Ibid, hal 78.

dan pengormatan terhadap hak asasi manusia dengan mendukung umpamanya kegiatan pemogokan buruh dan sebagainya. Sikap negatif lebih nyata ditunjukkan pada jenis LSM/Ornop yang seperti ini.

Keterlibatan LSM/Ornop dalam politik praktis sebenarnya hanyalah sebuah reaksi dari kemasygulan mereka terhadap proses modernisasi kehidupan politik dinegara-negara yang sedang berkembang terutama Indonesia. Dan mandulnya partai-partai politik sebagai pejuang dan pelindung aspirasi rakyat. Dalam kondisi seperti ini LSM/Ornop terpaksa mengambil alih fungsi partai politik yang memperjuangkan dan melindungi hak dan aspirasi masyarakat dari kemungkinan pelanggaran baik itu dari pemerintah maupun kekuatan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain aktifitas LSM/Ornop dalam kegiatan politik praktis hanyalah sementara sampai pemerintah membiarkan tumbuhnya pilar-pilar demokrasi dengan subur di di dalam negara.

Menurut John Clark :³

“Organisasi LSM/Ornop harus diberi tempat dalam proses pembangunan, karena proses pembangunan suatu negara akan berhasil apabila pembangunan itu di dukung oleh tiga unsur yait : Pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi sukarela atau LSM/Ornop”

Model pembangunan ini tidak bertentangan konstitusi Indonesia yang mengamanatkan koperasi sebagai salah satu soko guru dari bangunan ekonomi Indonesia, dengan demikian tidaklah sulit apabila pemerintah Indonesia mau seiring sejalan dengan LSM/Ornop dalam mengatasi permasalahan pembangunan

³ Ibid, hal 200

sehingga dapat terselesaikannya problem yang dihadapi oleh pemerintah sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

(*Unity Service Cooperation*. Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerja Sama) USC. SATUNAMA sebagai salah satu Ornop di Indonesia merasa perlu turut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai organisasi non profit, non primordial, USC. SATUNAMA menegaskan komitmen perjuangannya untuk menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, demokratis, berkeadilan sosial dan tegaknya HAM.

Lembaga yang berdiri pada 25 Maret 1998 ini awalnya bernama *USC. Canada Indonesia Office (Unity Service Cooperation. Canada Indonesia Office)* yang kemudian beralih menjadi *USC. Foundation (Unity Service Cooperation Foundation)*, atau dalam bahasa Indonesia menjadi Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerja Sama (SATUNAMA). Tujuan lembaga terutama mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial ekonomi, pendidikan, serta kegiatan lainnya, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih sesama manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras.

Lembaga ini memiliki kegiatan-kegiatan yang diutamakan pada pertanian, air bersih dan sanitasi, gender, usaha kecil dan perkoperasian, HAM, demokrasi, sektor informal, peternakan, kelautan dan perikanan, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, serta social justice, dengan good governance sebagai satu-satunya bidang kegiatan penunjang. Sedangkan bentuk kegiatan utamanya adalah pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat,

seminar, diskusi, lokakarya, serta perkreditan, yang ditunjang penerbitan dan publikasi, serta konsultasi pembangunan.

Beberapa diantara proyek-proyek yang dilaksanakan oleh USC. SATUNAMA adalah dengan cara mengusahakan kesinambungan dengan menumbuhkan kontrol dalam diri masyarakat, tapi tumbuh sebagai tanggapan masyarakat terhadap permasalahan setempat. Adapun bentuk orisinalitas itu telah mengugah pemikiran USC. SATUNAMA progresif mengenai pembangunan itu sendiri. Dengan pengertian awal bahwa "proyek kami akan lebih efektif jika masyarakat memahami proyek itu dengan baik dan bertanggung jawab penuh atas proses pelaksanaannya" yang selanjutnya berkembang menjadi bahwa "proyek kami akan menjadi lebih baik jika proyek itu dilaksanakan berdasarkan pada analisis masyarakat sendiri mengenai masalah yang mereka hadapi dan dengan menerapkan pemecahan mereka sendiri"

Dengan menggunakan pendekatan pembangunan sosial USC. SATUNAMA melihat masyarakat bukan hanya sebagai pemanfaat tetapi juga sebagai pengontrol dari proses pembangunan sosial. Masyarakat diarahkan agar dapat membuat teori. Apa yang dikatakan perubahan revolusioner itu bukan berarti peningkatan proyek saja (meski juga bisa berkesan seperti ini) tapi bisa menciptakan percaya diri bagi masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh USC. SATUNAMA antara lain berbentuk :

1. Pelatihan Kader

Pelatihan ini berguna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kader dalam memberi pendidikan kepada masyarakat agar dapat memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan program-program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat.

2. Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi

Hal ini berperan dalam membangun akses informasi dan pasar, serta media tukar pengalaman dan informasi bagi kalangan anggota.

3. Pengembangan Pertanian Lestari

Pengembangan pertanian lestari ini merupakan upaya untuk mengembalikan akses dan kontrol petani terhadap proses produksi hasil pertanian mereka, yang selama berlangsungnya revolusi-hijau akses dan kontrol terhadap proses produksi itu sepenuhnya dipegang oleh produsen teknologi pertanian dan pedagang perantara. Program ini boleh dikatakan merupakan proses menggugah kesadaran tentang potensi kekayaan sumberdaya lokal (alam, teknologi dalam bentuk kearifan lokal), serta dampak pertanian lestari dalam pelestarian alam dan kenakeragaman-hayati dalam jangka-panjang, dilanjutkan dengan pelatihan teknis seperti pembuatan kompos dan pupuk serta pestisida organik, maupun pengembangan predator alam. Berangkat dari

kesadaran baru terhadap penghargaan pada kearifan dan kekayaan sumberdaya lokal, didukung keterampilan teknis yang baik.

4. Pengembangan Sarana Umum untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sarana umum yang dimaksud dalam program ini terutama adalah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Ketersediaan air bersih di daerah seperti ini membawa dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan, bahkan mungkin masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomis seperti peternakan (khususnya unggas), serta pertanian (terutama sayur-sayuran dan tanaman obat). Kecuali itu, ketersediaan sarana air bersih terbukti dapat memotivasi masyarakat melakukan konservasi lahan di sekitar mata-air

5. Sumber Belajar

USC. SATUNAMA mengelola sebuah perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Prof. Loekman Soetrisno – untuk mengenal jasa Alm. Prof. Dr. Loekman Soetrisno, sebagai Pendiri sekaligus Anggota Dewan Pengurus USC. SATUNAMA. Sebagian besar koleksi buku-buku di Perpustakaan ini merupakan sumbangan dari Keluarga Jend. AH. Nasution. Dalam perkembangannya kemudian, Perpustakaan ini mengoleksi berbagai buku, artikel, laporan penelitian dan lesson learned dari sejumlah LSM. Saat ini ada 6500 judul buku dengan jumlah 6614 eksemplar tersedia di perpustakaan. Perpustakaan ini berada di tengah perkampungan Dusun Duwet. Sehingga secara rutin diakses oleh

penduduk sekitar yang sekaligus dapat mencerdaskan dan memberikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat sekitar.

Perjuangan yang dilakukan oleh USC. SATUNAMA ini di arahkan demi perkembangan potensi lokal dan nilai-nilai universal melalui kemitraan antar rakyat pada tingkat lokal, regional dan internasional dengan cara-cara tanpa kekerasan.

Salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh USC. SATUNAMA adalah dengan melakukan pendampingan-pendampingan terhadap kelompok-kelompok swadaya yang ada di masyarakat, seperti : KARTINI, KOPANA, dan lain-lain. Pendampingan terhadap kelompok-kelompok ini bertujuan untuk memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini penulis mengerucutkan permasalahan pada sistem ekonomi kerakyatan yang telah dilaksanakan di Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat Koperasi "Anugerah Agung" (KOPANA) yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat yang dibimbing dan dibina oleh USC. SATUNAMA. Sebagai salah satu kelompok swadaya masyarakat yang dibina dan dibimbing oleh USC. SATUNAMA, Koperasi "Anugerah Agung" (KOPANA) mengalami kemajuan yang cukup baik di dalam organisasinya baik dalam manajemen organisasinya maupun dalam sumberdaya manusianya. Koperasi "Anugerah Agung" ini telah menjadi kelompok dampingan dari USC. SATUNAMA sejak tanggal 20 Oktober 2001.

Pada awal berdirinya KOPANA di tahun 1999, KOPANA mengalami permasalahan yang cukup mendasar di dalam organisasinya. Antara lain, permasalahan sumberdaya manusia, manajemen organisasi, pendanaan dan lain sebagainya. Sebagai sebuah Organisasi yang bergerak di bidang perdagangan dan simpan pinjam, KOPANA membutuhkan sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan dan mengerti tentang tugas dan kinerja organisasi. Hal tersebutlah yang mendorong KOPANA untuk meminta pendampingan dari USC. SATUNAMA.

Sebagai organisasi non profit, non primordial, USC.SATUNAMA menegaskan komitmen perjuangannya untuk menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, demokratis, berkeadilan sosial dan tegaknya HAM. USC. SATUNAMA berjuang demi berkembangnya potensi lokal dan nilai-nilai universal melalui kemitraan antar rakyat pada tingkat lokal, regional dan internasional dengan cara-cara tanpa kekerasan.

Mengapa penulis tertarik menjadikan Koperasi "Anugerah Agung" sebagai bahan penelitian dalam pembuatan Skripsi, dikarenakan Koperasi "Anugerah Agung" sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang didampingi oleh USC.SATUNAMA adalah organisasi yang dinilai cukup baik perkembangan dan kemajuannya oleh USC.SATUNAMA setelah didampinginya, dan disisi lain penulis juga ingin mengetahui sejauhmana perkembangan dan kemajuan dari Koperasi "Anugerah Agung" setelah didampingi oleh USC.SATUNAMA.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana peran posisi USC. SATUNAMA sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Non Pemerintah (Ornop) di Indonesia dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan di Koperasi “Anugerah Agung” (KOPANA) di Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta pada Tahun 2004?”

C. Tujuan Penelitian

Gambaran permasalahan dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengkaji lebih mendalam tentang proses keterlibatan LSM/Ornop pada arus gerakan sosial dalam upaya pembentukan masyarakat yang demokratis dan partisipatoris.
2. Sebagai pertanggungjawaban intelektual, sekaligus untuk menerapkan teori-teori ilmu pemerintahan yang selama ini penulis dapatkan dalam studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sebagai sebuah pembelajaran bagi penulisan sebelum menghadapi dunia yang lebih luas dan lebih nyata, yang tidak dapat hanya di hadapi dengan teori-teori yang pernah penulis pelajari di masa perkuliahan

D. Kerangka Teori

Menurut Koentjoroningrat :⁵

"Teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat"

Konsep dasar teori adalah teori-teori yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga kegiatan itu menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Berdasarkan pada latar belakang masalah tentang pelaksanaan pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah nagari. Maka dapat disusun sebuah kerangka dasar teori sebagai suatu tolok ukur bagi penyusun dalam upaya melakukan analisa terhadap obyek penelitian.

Untuk menjelaskan, menelusuri secara lebih mendalam dan sistematis permasalahan diatas, tentang bagaimana peran posisi LSM/Ornop untuk mendorong proses demokratisasi yang substantif di Indonesia, seperti :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah

Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah (LSM/Ornop) adalah sebuah organisasi *volunteer* dimana merupakan organisasi yang bergerak dibidang pelayanan pemerintah sebagai *anti thesis* daripada lembaga-lembaga pemerintah yang tidak mampu menjembatani aspirasi masyarakat. LSM/Ornop mempunyai berbagai macam kegiatan yang berbeda satu sama lain, hal ini disebabkan oleh bidang-bidang khusus ataupun ang di tangani oleh masing-masing lembaga atau organisasi atau karakteristik

⁵ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 9

yang dimiliki oleh lembaga tersebut.⁶ Contohnya Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) adalah sebuah organisasi non pemerintahan yang bergerak dibidang kelestarian alam, Komunitas Girli adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang sosial yang mengurus anak jalanan yang berada di pinggir kali Code Yogyakarta.

Di banyak negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara Utara, topografi politik tidak lagi bisa digambarkan dengan kontur kiri atau kanan sebagaimana dikenal selama ini. Panorama politik telah berkembang lebih kompleks dengan adanya berbagai isu-isu politik. Perdebatan melelahkan menyangkut pemilikan publik *versus* pemilikan pribadi, penjualan kolektif atau pasar bebas masih tetap terpenting.

Menurut John Clark :⁷

"LSM/Ornop tidak terdiri hanya satu komunitas yang ketat, tetapi lebih merupakan satu spektrum yang luas – terlalu luas, sehingga, mungkin, membiarkan satu istilah menjadi berbagai macam arti. LSM/Ornop mencakup para manajer bantuan pangan senilai jutaan dollar, serikat buruh tani, penjaja jalanan, para ahli hukum yang membela persoalan lingkungan sampai dengan dukun bayi yang pergi kesana kemari tanpa alas kaki"

Dalam merespon suatu rezim pemerintah yang jelek (*bad government*) serta ancaman di era globalisasi, James Petras dan Henry Veltmeyer memetakan ada tiga macam bentuk LSM/Ornop, yaitu :⁸

⁶ Op. Cit John Clark .hal 245

⁷ ibid. John Clark Hal 43

⁸ James Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, Jogjakarta, 2001, hal 239.

Pertama, LSM/Ornop yang bersedia menjadi agen kepentingan wacana global neo-liberalisme, dimana mereka menjalin kerja sama melalui proyek-proyek besar dari World Bank, USAID, IMF, UNDP, dan funding sejenis lainnya.

Kedua, LSM/Ornop reformis yang berusaha mengkritisi dan mereformasi gerak langkah WTO, IMF, World Bank, dan meregulasi modal. Biasanya mereka menerima pendanaan dari lembaga sosial swasta dari negara-negara demokratik atau pun negara regional.

Ketiga, LSM/Ornop yang radikal, yang terus berani lantang melawan gerak langkah globalisasi, kampanye anti rasis, maupun mengusung semangat solidaritas dunia. Diantara mereka tidak sama dalam memilih strategi gerakannya, sasaran maupun pilihan isu (isu lingkungan, gender, pluralisme, anti kapitalisme dan lain-lain).

2. Masyarakat Sipil

Bagi Gramsci, masyarakat sipil adalah faktor kunci untuk memahami perkembangan kapitalisme. Disisi lain, Gramsci melihat itu sebagai suprastruktur yang mewakili faktor aktif dan positif dari perkembangan sejarah. Ia merupakan hubungan-hubungan budaya dan ideologi yang kompleks, kehidupan intelektual dan spiritual serta eksperimen politik. Meskipun Negara memiliki otonominya sendiri, tetapi dalam sebuah

masyarakat kapitalis, Negara tidak punya pilihan lain kecuali melayani kepentingan kaum kapitalis.⁹

Pembicaraan tentang negara yang ada dalam sistem kapitalis, memunculkan pertanyaan, seperti yang dikemukakan oleh Gramsci sendiri, adalah bagaimana duduk perkaranya sampai kaum buruh memberikan suaranya kepada negara yang dikuasai oleh kaum borjuis? Mengapa buruh yang ditindas oleh kaum borjuis, mau patuh pada kekuasaan negara yang melindungi dan melayani kepentingan kaum penindasnya?

Gramsci lalu mengembangkan teorinya tentang *kekuasaan hegemonic*. Kekuasaan *hegemonic* merupakan kekuasaan dari satu kelompok masyarakat yang diterima atau dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi, meskipun sebuah partai politik sebenarnya melayani kepentingan kaum borjuasi (dan merugikan kepentingan kaum buruh), ternyata para buruh tetap mendukung pemerintah yang dijalankan oleh partai ini. Maka dikatakan partai ini memiliki kekuasaan *hegemonic* terhadap masyarakat tersebut.

3. Negara

Menurut Arief Budiman, Negara adalah suatu kesatuan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas tertentu, memiliki suatu aturan hukum tertentu dan keberadaannya diakui oleh negara lain.¹⁰

⁹ Antoni Gramsci, "*Negara dan Kapitalisme*", Gramedia, Jakarta, 2000, hal 145.

¹⁰ Arif Budi Aman, "*Teori Negara*", Gramedia, Jakarta, 2000, hal 104

Atau juga dapat di katakan Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar di dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap-perintah-perintah yang dikeluarkannya.¹¹

Negara secara umum terminologinya adalah sebuah organisasi yang paling tinggi dan mencakup pengertian yang paling luas. Negara merupakan sebuah pakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk sesuatu tujuan tertentu. Negara pada dasarnya melayani kepentingan dari kelompok yang dominan di masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mada Sukmajati, Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendidikan masyarakat dan pengikutsertaan masyarakat kedalam proses pembangunan dimana masyarakat berperan serta dalam penentuan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.¹²

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode dalam pengembangan masyarakat demi tercapainya demokratisasi di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat juga dikatakan sebagai upaya pendidikan politik terhadap masyarakat.

¹¹ Ibid, hal 3

¹² Mada Sukmajati, *Jurnal Demokrasi*, Forum LSM DIY, 2003, hal 59

Di Indonesia pengikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan belum berjalan dengan baik, sehingga sering mengakibatkan mis-komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mis-komunikasi yang sering terjadi ini mengakibatkan perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat disini dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendidikan politik dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta pengikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia.

5. Peran

Peran dapat diartikan menjadi sebuah bentuk keterlibatan seseorang atau organisasi dalam perilaku dan tindakan baik yang berbentuk positif atau negatif. Peran dapat juga diartikan menjadi sebuah upaya atau suatu dukungan ataupun dorongan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada seseorang atau organisasi lainnya demi kemajuan seseorang atau organisasi tersebut.

Menurut Mada Sukmajati :¹³

“Peran serta masyarakat dalam pembangunan di Indonesia dapat juga dikatakan sebagai sebuah keterlibatan masyarakat didalam jalannya pembangunan di Indonesia. Peran ini bisa dilakukan oleh perseorangan atau organisasi. Peran ini dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pendorongan atau pendukung menuju tingkat kemajuan yang lebih baik lagi bagi seseorang atau organisasi yang didorong”

¹³ Op.Cit Hal 155

6. Ekonomi Rakyat

Menurut Faried Wijaya :¹⁴

“Bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana individu (produsen maupun konsumen) dan memilih atau menentukan untuk menggunakan sumber-sumber yang jumlahnya terbatas yang dimilikinya dan yang dapat digunakan secara alternatif untuk memproduksi berbagai barang dan jasa serta mendistribusikannya sebagai konsumsi, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, diantara para individu atau berbagai golongan di dalam masyarakat”

Melihat definisi diatas, sebenarnya tidak perlu lagi mempermasalahkan apakah namanya menjadi ekonomi kerakyatan atau lainnya., karena sudah jelas yang menjadi aktor atau pemain dalam perekonomian dapat seorang individu, kelompok atau golongan yang notabene mereka adalah sekelompok masyarakat yang mendiami suatu negara.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Bila masalah dan teorinya sudah jelas biasanya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui pula.¹⁵

Konsep atau penjelasan adalah sebuah hal yang sangat vital dalam dalam sebuah penelitian. Biasanya jika masalah dan kerangka teori sudah jelas maka fakta atau fenomena mengenai gejala gejala yang menjadi pokok perhatian atau

¹⁴ Faried Wijaya, *Ekonomi dan Perencanaannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, Hal 122

¹⁵ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta, 1974, Hal 21.

penelitian akan jelas juga, dan sebuah konsep sebenarnya adalah merupakan definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau fenomena-fenomena tersebut.

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah-istilah penting antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai berikut :

1. Negara

Secara umum terminologinya adalah sebuah organisasi yang paling tinggi dan mencakup pengertian yang paling luas. Negara merupakan sebuah pakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk sesuatu tujuan tertentu. Negara pada dasarnya melayani kepentingan dari kelompok yang dominan di masyarakat. Negara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pengatur jalannya pemerintahan.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang berdiri atas dasar swadaya masyarakat tanpa ada bantuan dari pemerintah. LSM berkecimpung secara langsung dengan masyarakat kelas bawah. Secara umum dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang bekerja mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan baik secara material ataupun secara pendidikan atau dapat juga dikatakan bahwa LSM adalah wadah bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan pendidikan guna kemajuan individu atau kelompok itu sendiri.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat disini dapat diartikan sebagai suatu acara atau metode dalam memberikan pendidikan pada masyarakat agar dapat menyelesaikan persoalan atau masalah mereka secara pribadi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam pembelajaran tentang kemandirian dalam berpikir maupun bertindak sehingga dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab mereka tanpa uluran tangan dari pemerintah. Jadi pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan kemandirian masyarakat baik dalam bertindak ataupun dalam berpikir.

4. Ekonomi Rakyat

Ekonomi Rakyat dapat dipahami sebagai suatu proses tindakan-tindakan ataupun proses ekonomi yang berlandaskan atau berasaskan pada kerakyatan bisa juga disebut sebagai ekonomi Kerakyatan. Dimana ekonomi kerakyatan ini diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat atau penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Proses ekonomi yang terjadi berasaskan pada gotong-royong dan bersifat *simbiosis mutualisme*, dimana semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tersebut saling diuntungkan dan tanpa ada yang tertindas dan menindas.

5. Gerakan Sosial

Gerakan Sosial sebagai peran atau partisipasi masyarakat sebagai pelaku demokrasi merupakan kekuatan penting dalam proses pengawalan

demokrasi yang substantif dan merupakan salah satu kekuatan penting masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan, *counter opini*, *counter hegemoni* dari negara. Gerakan sosial disini dapat merupakan suatu bentuk Organisasi sosial yang berada di luar birokrasi pemerintah berawal dari sikap atau respon masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Organisasi sosial ini berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Organisasi-organisasi sosial yang berbasis pada masyarakat merupakan salah satu unsur yang penting dalam kontrol terhadap pembangunan. Dengan adanya organisasi-organisasi sosial yang berada diluar birokrasi pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan maka pemerintah dapat mengevaluasi program-program kerja dan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ataupun tidak memberatkan masyarakat? Atau mungkin juga masyarakat dapat memberi masukan-masukan kepada pemerintah tentang kondisi dan keadaan masyarakat sebelum memberlakukan atau membuat sebuah kebijakan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagaimana suatu konsep dapat diukur dengan adanya indikator-indikator tertentu. Menurut Koentjoroningrat, definisi operasional adalah usaha untuk mengubah konsep yang berupa *construct* dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan

ditentukan kebenarannya oleh orang lain.¹⁶ Merupakan suatu cara tentang bagaimana mengukur atau melihat sesuatu variabel dalam penelitian sehingga adanya hal tersebut membuat penelitian yang dilakukan benar-benar terarah dan jelas.

Definisi operasional yang digunakan adalah seperti berikut :

a. Peran USC. SATUNAMA di dalam pembangunan masyarakat di Indonesia khususnya Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta memiliki divisi-divisi untuk menjalankan program-program kerjanya, yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengembangkan sumberdaya lokal, faham dan kritis terhadap realitas sosial-politik, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara ekonomis dan mampu secara otonom menentukan pilihan bagi perkembangan hidupnya.

2. Pelatihan

Asumsi yang mendasari pengadaan pelatihan ini adalah, perubahan hanya mungkin dicapai dengan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan meyakini bahwa keberagaman merupakan potensi untuk perkembangan masyarakat sipil yang kuat didalam format politik demokratis

i ¹⁶Ibid, hal 75

3. Pendidikan Publik

USC.SATUNAMA mencoba memfasilitasi ketersediaan berbagai jenis informasi yang mungkin dapat membuka wawasan dan kesadaran tentang demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Keseluruhan informasi ini dihadirkan kepada masyarakat (*public*) secara langsung melalui program diskusi interaktif lewat radio, pertunjukan kesenian tradisional (ketoprak, wayang, campur sari dan jathilan), pemutaran film keliling, penerbitan buku dan pamflet, pengadaan perpustakaan keliling, pembacaan cerita bagi anak-anak.

4. Divisi Sumber Daya dan Pengembangan Program

Divisi ini dibentuk untuk membagi pengalaman dan pemahaman kepada organisasi dan lembaga-lembaga pembangunan tentang penguatan dan pengembangan organisasi masyarakat sipil dalam perspektif transformatif.

5. Divisi Umum/Program Pendukung

Divisi Umum merupakan instrument pendukung seluruh program USC. SATUNAMA, baik dari aspek personil (sumberdaya manusia), peralatan maupun finansial.

- b. Kegiatan Divisi Pemberdayaan Masyarakat USC. SATUNAMA di bidang Ekonomi Kerakyatan yang telah dilaksanakan di Koperasi "Anugerah

Agung” (KOPANA) Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta adalah :

1. Pelatihan terhadap pengurus KOPANA
2. Pembantuan dana untuk pengembangan usaha kecil dan koperasi

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Eksploratif. Dimana penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷ Sedangkan eksploratif adalah penyelidikan tentang sesuatu.¹⁸ Jadi penelitian deskripsi eksploratif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta hasil penyelidikan secara faktual dan akurat. Penilaian bersifat deduktif dan didasarkan pada teori yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komposisi data, serta menggambarkan obyek dari hal-

¹⁷ Moh Nasr, Ph.D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal. 63.

¹⁸ Widodo, Amd, *Kamus Ilmiah Populer*, Absolut, Jakarta, 2002.

hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

2. Data yang dibutuhkan

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden atau sumber data.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi.

Teknik ini merupakan cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diselidiki.

b. Metode dokumentasi yaitu dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka. adapun data tersebut memiliki sumber sebagai berikut : buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah dan data dari internet.

c. Metode Wawancara ini dipergunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan dengan mewawancarai orang yang terlibat langsung dengan aktifitas yang akan diteliti. Wawancara mendalam (*depth*

interview), metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Unit Analisa

Pengurus USC. SATUNAMA (*Unity Service Cooperation*. Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama) dan Pengurus Koperasi "Anugerah Agung" (KOPANA), Desa Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

5. Teknik analisa data

Tehnik yang dipakai adalah tehnik kualitatif, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik atau matematis serta dengan menggunakan analisa isi agar mendapat jawaban ilmiah logis dan empirik.

- a. Mereduksi data, dalam hal ini mereduksi data bukan berarti asal mengurangi data, tetapi melakukan seleksi dengan memilih data yang relevan dan bermakna. Memfokuskan pada data yang mengarah pada permasalahan lalu disederhanakan, menyusun secara sistematis dengan menampilkan hal-hal pokok dan penting serta membuat ringkasan yang memberikan gambaran tujuan tentang hasil temuan serta maknanya.
- b. Menampilkan data, adalah sebuah langkah yang bermaksud menyajikan hasil reduksi kedalam laporan secara sistematis sehingga mudah dibaca dan di fahami.

- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, dalam hal ini verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun penyampaian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data dan analisa.
